



Presiden Perintahkan Mentan Genjot Produksi Beras Antisipasi El Nino

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menggenjot produksi beras guna menjaga stok beras nasional menjelang fenomena El Nino atau musim cuaca abnormal yang diperkirakan terjadi pada kuartal III 2023.

“Yang jelas Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi. Jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).

Presiden Jokowi, kata Arief, juga memerintahkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso untuk terus menyerap beras produksi petani. Pemerintah juga sudah mengamankan pengadaan beras dari impor sebanyak dua juta ton untuk 2023, namun baru terealisasi

500 ribu ton.

Adapun sepanjang Januari-Juli 2023, Bulog menyalurkan cadangan beras, antara lain, sekitar 639 ribu ton untuk bantuan pangan kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 600 ribu ton lainnya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Saat ini, cadangan beras pemerintah di Bulog berkisar di 600 ribu ton.

Selain beras, kata Arief, Presiden Jokowi juga meminta Bulog untuk menjaga ketersediaan bahan pangan lain yakni jagung, dan kedelai.

Khusus jagung, Presiden memberikan perhatian agar Bulog dapat menjaga ketersediaan jagung agar stabilitas harga terjaga, khususnya harga pakan ke peternakan sehingga stok dan harga komoditas pangan lainnya, seperti telur, tidak terganggu. “Kalau jagung lebih banyak untuk pakan, jadi food and feed ya, jadi kalau pangan buat kita itu food, kalau feed itu seperti ja-



ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kiri) memberikan keterangan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

gung karena jagung ini akan berpengaruh kepada harga ayam dan juga harga telur,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bulog Budi Waseso menjelaskan Bulog terus menyerap produksi pangan dari dalam negeri. Bulog juga akan segera menyerap

produksi jagung dari hasil panen di Papua. “Kita sambil berjalan ya, sambil berjalan terus serap langsung kita sampaikan,” kata Budi.

Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin siang ini juga membahas mengenai hilirisasi produk pangan. (ANTARA)

Kemenkeu Diskusikan Pembiayaan Risiko Bencana Bersama Delegasi ASEAN

YOGYAKARTA - Kementerian Keuangan RI mendiskusikan implementasi strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana bersama delegasi negara anggota ASEAN di Yogyakarta, Senin (10/7).

Kegiatan itu berlangsung dalam seminar bertajuk “Disaster Risk Financing and Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia” yang merupakan acara sampingan atau “side event” Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

“Kami mengajak para peserta untuk dapat aktif berdiskusi dan menyampaikan pembelajaran penting terkait upaya pembangunan resiliensi mengingat Asia Tenggara termasuk daerah paling rawan bencana di dunia,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono saat membuka acara itu.

Parjiono menuturkan selama ini Indonesia telah menyusun Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau “Disaster Risk Financing and Insurance (DR-FI)” yang memberi peluang pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD.

Strategi itu, kata dia, telah mendapat pengakuan dari berbagai organisasi internasional sebagai pencapaian yang signifikan untuk memperkuat pendanaan risiko bencana. “Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang telah memiliki strategi nasional terkait dengan pendanaan dan asuransi risiko bencana,” kata dia.

Strategi pendanaan yang diluncurkan Kemenkeu pada 2018 tersebut, menurut dia, berangkat dari pengalaman sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia. Parjiono mengatakan saat Yogyakarta dilanda

gempa bumi dahsyat pada 2006, Indonesia belum memiliki strategi kebijakan untuk pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Pada hal kerugian akibat bencana itu ditaksir mencapai kurang lebih Rp29 triliun. “Kerugian yang ditransfer ke sektor asuransi hanya senilai kurang lebih Rp 300 miliar yang kalau kita hitung hanya 1 persen dari total kerugian dan kerusakan, sehingga hampir semua biaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditanggung oleh APBN atau APBD,” kata dia.

Selang 12 tahun, serangkaian bencana berskala besar masih terus terjadi di Indonesia di antaranya gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, berikutnya gempa di Lombok serta tsunami di Selat Sunda pada 2018.

Pada tahun yang sama, ujar Parjiono, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.500 bencana terjadi di Indonesia yang menyebabkan lebih dari 3.300 orang meninggal serta lebih dari 10 juta orang mengungsi, 300.000 unit rumah rusak, dengan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai sekitar Rp 100 triliun. “Rentetan bencana yang terjadi dengan besarnya kerugian ekonomi tentunya memicu pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan strategi dan menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana,” kata dia. (ANTARA)



ANTARA/Luqman Hakim/aa
Para pembicara seminar “Disaster Risk Financing and Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia” yang digelar Kemenkeu di Yogyakarta.

FOTO CERITA

Pendulangan Intan Tradisional di Geopark Meratus



SINAR matahari menyibak awan mending kala itu ditemani dengan suara raungan mesin diesel pompa air memecah kesunyian saat sejumlah pekerja memulai berujung mencari setitik intan permata Kalimantan Selatan di pendulangan tradisional intan Cempaka, Jalan Pempung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Para pendulang dengan alat yang disebut linggangan, berbentuk kerucut seperti caping terbalik terbuat dari kayu, bisa menghabiskan waktu sehari-hari melah material yang digali dari kedalaman 15 meter, dengan air untuk menemukan bijih yang mengandung intan.

Pendulangan yang memadukan unsur budaya dan kearifan lokal dari masyarakat setempat itu sempat lesu sejak beberapa tahun terakhir dan diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19, meskipun sebenarnya masih banyak ditemukan Galuh (sebutan

warga setempat untuk intan karena para pendulang dilarang menyebut intan atau berlian yang dipercaya akan membawa sial) di lokasi itu.

Sejarah mencatat pada 26 Agustus 1965 sebanyak 24 penambang tradisional menemukan intan seukuran telur burung merpati dengan berat 166,75 karat yang ditaksir berharga Rp10 triliun, hingga Presiden Pertama RI Ir Soekarno memberi nama ‘Intan Trisakti’.

Aktivitas pendulangan intan Cempaka telah ada sejak abad ke-sembilan Masehi atau sekitar tahun 800-an dan kini tercakup dalam wilayah yang ditetapkan menjadi salah satu situs Geopark Meratus dan diajukan ke UNESCO Global Geopark (UGG) sebagai upaya Pemprov Kalsel untuk melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal yang masih melukukn ritual syukuran usai

mendapatkan hasil.

Keberadaan intan di kawasan tersebut sangat terkait dengan proses pembentukan Pegunungan Meratus sejak 200 juta tahun lalu. Intan terbentuk pada kedalaman sekitar 100 mil (160 km) di bawah permukaan bumi dan kemudian batuan intan mengalami pengangkatan bersama Pegunungan Meratus ke permukaan sekitar 22,5 juta tahun lalu.

Lokasi penambangan yang berjarak sekitar 20 km dari Bandara Syamsudin Noor ke arah barat Kota Banjarbaru itu telah menjadi tempat wisata unggulan Kalimantan Selatan dan dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menonton secara langsung proses pendulangan tradisional tersebut serta berbelanja intan dan batu permata lainnya.

Foto dan teks: Bayu Pratama S

ARTIKEL

Oleh Luqman Hakim

Menyelaraskan Perppu Cipta Kerja dengan Pengembangan Pariwisata DIY

MESKI memunculkan pro dan kontra berkepanjangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setidaknya, regulasi baru tersebut memberikan angin segar para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di Kota Gudeg karena kepastian hukum serta kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Hal itu terlihat dari munculnya beragam industri pariwisata baru, mulai dari destinasi wisata, restoran, hingga perhotelan yang tidak lagi terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, melainkan telah merata hingga Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.

Dengan pembangunan sektor pariwisata yang merata, diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan peluang usaha kecil baru sehingga tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di DIY bisa terus ditekan.

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Herman Tony membenarkan fakta itu. Keberadaan Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha sektor pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Untuk menjalankan usaha perhotelan dan restoran di DIY, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus sederet administra-

si berlapis secara manual seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) melalui birokrasi yang rumit. Mereka cukup mengurus izin usaha berbasis risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mengakses portal One Single System (OSS) secara daring.

Jika usaha yang didaftarkan masuk klasifikasi berisiko rendah, secara otomatis NIB dapat digunakan untuk beroperasi. “Sebelum ada OSS, dulu ada TDUP yang hanya bisa terbit setelah semua persyaratan dipenuhi. Sekarang dibalik, izin dikasih dulu nanti persyaratan baru dipenuhi belakangan,” ucap Herman Tony.

Hingga saat ini, hotel berbintang serta restoran di bawah naungan PHRI DIY terus bertambah. Jumlahnya mencapai lebih dari 400 anggota, termasuk di antaranya yang baru beroperasi di Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Kemunculan hotel berbintang tidak lepas dari pesatnya investasi di sektor pengembangan destinasi wisata di tiga wilayah itu. Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) juga turut menjadi pemantik tambahan terhadap kemunculan hotel berbintang di Kulon Progo.

Meski terbelang baru, operasional hotel-hotel di sisi barat dan selatan DIY tidak sia-sia. Banyaknya industri tersebut mampu menggaet wisatawan untuk



ANTARA/Syamsuddin Hasan/aa
Salah satu tempat rekreasi/objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

menginap meski lokasinya jauh dari pusat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data PHRI DIY, okupansi (tingkat hunian kamar) hotel di DIY pada Februari 2023 rata-rata mencapai di atas 60 persen dan 80 persen pada akhir pekan. Namun demikian, Herman Tony memberikan catatan khusus terlepas sederet kemudahan perizinan yang disuguhkan Perppu Cipta Kerja.

Regulasi yang diratifikasi kala COVID-19 mendera Tanah Air itu dinilai masih membutuhkan sosialisasi yang matang. Menurutny, organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY belum memiliki persepsi atau penjerumahan yang sama terhadap regulasi itu, khususnya dalam pengukuran klasifikasi

risiko usaha perhotelan.

Pembangunan DIY Selatan

Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY Hermawan Ardiyanto berharap Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mampu mendukung kemajuan pembangunan ekonomi di sisi DIY selatan. Hal itu sejalan dengan visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Periode 2022-2027 yakni “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Melalui visi-misi itu, Pemda DIY menggeser fokus pembangunan ke wilayah selatan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di provinsi ini. Wilayah selatan

yang dimaksud adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang angka kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Beberapa pembangunan di wilayah selatan yang secara konkret dimulai Pemda DIY, antara lain pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) serta pembukaan akses wisata kawasan selatan, salah satunya di Gunungkidul.

Dengan Perppu Cipta Kerja, diharapkan lebih banyak investor yang berniat menanamkan modal demi mengembangkan perekonomian di sisi selatan D.I.Y., salah satunya dengan membidik potensi pariwisata.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardiyanto percaya bahwa progres pembangunan sektor pariwisata di sisi selatan DIY masih akan berlanjut. Peralnanya, munculnya destinasi pariwisata baru berbasis alam, budaya, maupun sejarah selalu membutuhkan fasilitas pendukung lain yang dapat dibidik oleh para investor baik dari aspek amenities maupun pemenuhan aksesibilitasnya.

Sumber Daya Lokal

Kendati pembangunan pariwisata terus berkembang, geliatnya harus seiring sejalan dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di DIY yang tercatat masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan di DIY pada September 2022 tercatat pa-

ling tinggi di Pulau Jawa mencapai 11,49 persen dari total penduduk. Angka itu naik dari periode Maret 2022 yang sebesar 11,34 persen. Karena itu, selain merasakan kemudahan perizinan, para pelaku industri memiliki kewajiban melibatkan sumber daya manusia (SDM) serta produk lokal.

Pada Pasal 26 ayat (1) poin (f) UU Cipta Kerja tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengemban komitmen dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Berikutnya, pada poin (f) tersebut dipertegas oleh poin (g) yang menyebutkan setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Implementasi Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan evaluasi.

Tanpa ada pengawasan, kewajiban penggunaan produk dan pelibatan SDM lokal sekadar menjadi aturan di atas kertas yang sulit direalisasikan. Terkait hal itu, Ketua GIPI DIY Bobby Ardiyanto berharap pemerintah tidak lepas tangan. Pemda DIY melalui instansi terkait perlu ikut menyiapkan SDM yang memiliki link and match atau sesuai dengan kompetensi, termasuk produk lokal yang selaras dengan kebutuhan industri.*